



Jangan Sampai Jadi Blunder

■ Sertifikat Vaksin Jadi Syarat Masuk Fasilitas Umum

SERTIFIKAT VAKSIN

- ▶ Unduh aplikasi PeduliLindungi di Google Play Store (Android) atau App Store (iOS)
- ▶ Buka aplikasi PeduliLindungi lewat smartphone
- ▶ Isi nama lengkap dan nomor HP Anda
- ▶ Anda akan menerima kode OTP yang dikirimkan melalui SMS
- ▶ Buka kembali aplikasi PeduliLindungi, lalu masukkan kode OTP tersebut.
- ▶ Login aplikasi PeduliLindungi
- ▶ Klik ikon "Akun" yang terletak di sebelah kanan atas aplikasi
- ▶ Pada menu "Akun", klik opsi "Sertifikat Vaksin", lalu pilih nama Anda pada halaman tersebut.
- ▶ Pada halaman selanjutnya, akan tertera sertifikat tahap pertama dan/atau tahap kedua.
- ▶ Sertifikat ini dapat ditunjukkan ke petugas sebagai syarat masuk fasilitas umum

YOGYA, TRIBUN - Tak hanya membantu menangkal dan melawan virus corona di dalam tubuh. Di luar itu, seseorang yang sudah divaksin bakal mendapat kemudahan untuk mengunjungi fasilitas umum.

Mengapa? Kini muncul wacana, sertifikat vaksin Covid-19 bakal menjadi syarat perjalanan maupun mendatangi fasilitas umum, seperti mal, tempat-wisata dan lainnya.

Langkah uji coba pun tengah dilakukan. Misalnya pengunjung wajib sudah divaksin dengan bukti sertifikat vaksin

Di DIY itu belum vaksin bukan karena tidak mau, tapi ya belum dapat gilirannya saja.

Baskara Aji
Sekda DIY

● ke halaman 11

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	☐ Negatif	☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi

Jangan Sampai

• Sambungan Hal 1

Covid-19 untuk bisa masuk ke mal-mal di sejumlah kota besar selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Jawa-Bali.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan juga sempat mengutarakan bahwa Malioboro pun bakal dijadikan kawasan wajib vaksin Covid-19.

Artinya, para pengunjung yang akan menyambangi ikon Yogyakarta tersebut wajib memiliki dan menunjukkan kartu vaksin Covid-19.

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY, Bobby Ardyanto Setyo Aji mengapresiasi langkah yang ditempuh pemerintah.

Hal itu menunjukkan keseriusan pemerintah untuk terus menggaungkan percepatan dan perluasan cakupan vaksinasi agar kekebalan kelompok terhadap virus corona dapat segera terwujud.

Namun, industri pariwisata menuntut kesiapan pemerintah dalam mengimplementasikan regulasi tersebut di lapangan agar tak terjadi blunder.

Blunder yang dimaksud tak hanya soal pengawasan, tapi juga jangan sampai sektor pariwisata jadi kambing hitam ketika terjadi sesuatu yang tak diinginkan.

"Jangan sampai pelaksanaan di lapangan justru jadi blunder sendiri karena ketidaksiapan pemerintah.

Karena jawabannya ada di sejauh mana kesiapan pemerintah untuk bisa menjalankan regulasi ini," jelas Bobby saat dihubungi, Rabu (11/8).

Memberikan contoh, Bobby mengatakan pemerintah sebelumnya pernah mewajibkan pelaku perjalanan untuk membawa dokumen hasil pemeriksaan rapid test antigen. Namun realisasi kebijakan tersebut awalnya kurang memuaskan.

Sebab, pelaksanaannya tidak diimbangi dengan ketersediaan rapid test antigen yang mumpuni sehingga terkadang justru menimbulkan kerumunan antrean.

Selain itu, layanan pemeriksaan rapid test antigen juga tidak tersedia di pintu masuk beberapa fasilitas operasi transportasi publik seperti stasiun, bandara, dan terminal.

"Di awal itu jadi blunder dan menimbulkan permasalahan tersendiri karena ketersediaan antigen di pintu masuk transportasi publik itu masih minim. Sehingga itu jadi masalah tersendiri di lapangan terkait implementasi regulasi itu," jelasnya.

Karenanya, Bobby mengusulkan agar Pemda DIY dapat menyediakan sentra vaksinasi di destinasi-destinasi wisata guna mempermudah wisatawan memperoleh suntikan vaksin jika mereka belum mendapatkannya.

"Sama seperti waktu berangkat lewat airport dan stasiun, itu kan (layanan) antigen tersedia. Jadi kalau di belum sempat melakukan tes dia bisa melakukan di tempat itu," terangnya.

Bobby melanjutkan, sejauh ini sebagian besar pelaku wisata yang berada di bawah naungan GIPI DIY telah menjalani vaksinasi.

Adapun total pekerja wisata yang terdata pihaknya adalah sekitar 35 ribu orang.

"Sudah sebagian besar tervaksin. Di akhir Agustus kami juga dapat kuota lagi 3.000. Itu kerja sama Dispar DIY, Dinkes, dan GIPI. Kita menyediakan untuk pelaku wisata agar semua pelaku bisa divaksin," jelasnya.

Jika regulasi itu benar-benar diterapkan, pihaknya siap membantu untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap wisatawan yang datang.

Sementara itu, Sekretaris Daerah DIY, Kadamanta Baskara Aji turut menanggapi kebijakan sertifikat vaksin Covid-19 yang dijadikan salah satu syarat untuk memasuki fasilitas publik.

Aji menganggap bahwa kebijakan itu berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Sebab, masyarakat DIY memiliki keinginan yang tinggi untuk menjalani vaksinasi. Namun memang belum seluruhnya berkesempatan mendapat suntikan vaksin.

"Ya kalau mereka itu sebetulnya sudah ingin vaksin tapi belum sempat dilayani karena bukan kemauan yang bersangkutan kan kasihan," jelasnya.

Mantan Kepala Disdikpora DIY ini melanjutkan, kebijakan itu tepat diterapkan jika memang ada sekelompok warga yang menolak pelaksanaan vaksinasi.

"Jadi hal itu boleh saja dilakukan kalau ada kelompok masyarakat yang tidak mau vaksin. Tapi di DIY

kan motivasinya jalan baik. Di DIY itu belum vaksin bukan karena tidak mau, tapi ya belum dapat gilirannya saja," bebernya.

Saat ini, cakupan vaksinasi di DIY telah mencapai 43,79 persen. Artinya telah ada 1.261.011 orang dari total sasaran sebanyak 2.879.699 orang yang menerima suntikan vaksin Covid-19 dosis pertama.

Sedangkan sebanyak 13,27 persen atau 488.782 orang di antaranya telah menuntaskan vaksinasi dengan menerima suntikan dosis kedua.

Di daerah seperti Kulon Progo, Sekretaris Dinas Pariwisata Nining Kunwanti, menyatakan siap mengikuti kebijakan Pemda DIY.

"Kita ngikut kebijakan DIY nanti seperti apa. Karena sampai saat ini belum ada pembahasan," kata Nining Kunwanti, kemarin.

Sebab kebijakan kepariwisataan di DIY menurutnya harus kompak.

Terpisah Pengelola Wisata Goa Kiskendo, Suisno mengatakan pihaknya setuju dengan adanya rencana kartu vaksin sebagai syarat yang harus dipenuhi para wisatawan ketika berkunjung ke tempat wisata.

Dengan begitu, pelaku wisata mengetahui wisatawan yang berkunjung tersebut sudah tervaksin.

Senada Ketua Pengelola Desa Wisata Nglinggo, Anton Nugroho mengatakan pihaknya akan mengikuti prosedur yang ada ke depannya.

"Kalau itu memang sudah menjadi prosedur, kami harusnya mengikuti. Demi kesehatan kita semua," ucapnya. (tro/scp)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005